

PROSPEK DAN TANTANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH

Sulaiman Tripa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang Nomor 1,
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia. Email: st_aceh@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Konsep Pemerintahan Gampong sudah dikenal sejak Kerajaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika Indonesia merdeka, konsep gampong tetap digunakan. Penyeragaman mulai berlangsung sejak lahirnya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Gampong bersemi kembali setelah reformasi, di mana diikuti dengan beberapa UU Otonomi untuk Aceh. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa perbedaan antara Pemerintahan Gampong dan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah perangkat pemerintahannya.

(Kata Kunci: **Gampong, Pemerintahan, Aceh**)

ABSTRACT

Gampong Government (Pemerintahan Gampong) concept has been known since Sultan Iskandar Muda Kingdom (1607-1636). When is independent Indonesia, gampong concept permanent is used. Standarization begins going on since out in it Law No. 5/1979 about Desa Government (Pemerintahan Desa). Gampong Government (Pemerintahan Gampong) springs to return after reformation, where followed with a few Autonomy Law for Aceh. Based on penelusuran that done, founding some differences between Gampong Governments (Pemerintahan Gampong) and Desa Government (Pemerintahan Desa), one of them the government ware.

(Keyword: **Gampong, Government, Aceh**)